

ABSTRACT

With the issuance of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2015 On the Fourth Amendment to the Presidential Regulation Number 54 of 2010 Concerning Procurement of Government Goods/Services. Article 106 which states Procurement of Government Goods / Services done electronically (e-procurement). Then all Procurement of Government Goods/Services electronically or e-procurement is done by way of e-tendering or e-purchasing. So the implementation of Internal Audit should follow the rules and regulations that apply electronically. Internal Audit methods must adapt to the existing system. This study uses a qualitative ethnographic data analysis methods. These results indicate that there is a change in the preparation, methods and costs during the implementation of internal audits of the e-procurement .

Keywords : E-Procurement, E-Tendering, E-Purchasing, Method Internal Audit



ABSTRAK

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 106 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik (*e-procurement*). Maka seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik atau *e-procurement* dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Sehingga pelaksanaan Audit Internal harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku secara elektronik. Metode Audit Internal harus menyesuaikan dengan sistem yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis data etnografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam persiapan, metode dan biaya saat pelaksanaan audit internal terhadap *e-procurement*.

Kata Kunci : *E-Procurement*, *E-Tendering*, *E-Purchasing*, Metode Audit Internal

